

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada dasarnya bertujuan membangun manusia seutuhnya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh keadaan ekonomi serta kondisi sosial masyarakat (Saputra & Mahmudi, 2012). Kesejahteraan masyarakat termasuk dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta gambaran dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan (Wiriana & Kartika, 2018). Kesejahteraan diwujudkan agar masyarakat hidup layak dan dapat mengembangkan diri sehingga mampu mengembangkan fungsi sosialnya dengan baik (UU No. 14 Tahun 2019).

Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengamati kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Wijayanti & Darsana, 2013). IPM diperkenalkan pertama kali oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Dalam buku pembangunan ekonomi, IPM sebagai indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan (Todaro & Smith, 2011).

Peningkatan IPM tidak hanya bertumpu pada peningkatan perekonomian saja, tetapi diperlukan pembangunan dari segala aspek. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata. Dengan adanya pemerataan pembangunan, maka ada jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil dari pembangunan tersebut (Putra & Ulupui, 2015).

Dalam menentukan kemajuan suatu daerah sangat diperlukan sumber daya modal melalui pemberdayaan sumber daya manusia sebagai penggerak perekonomian. Salah satu hal yang melatarbelakangi perlunya kepedulian terhadap pembangunan manusia karena banyak negara yang sedang berkembang, telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi, sosial, dan kemiskinan. Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), ada empat hal pokok untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (Lumbantoruan & Hidayat, 2013).

Sejak pertama kali diperkenalkan, IPM menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan masalah yang penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata bagi semua masyarakat. Berbagai negara mengadopsi konsep pembangunan manusia yang digagas oleh UNDP. Indonesia pertama kali menghitung IPM pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun sekali. Namun sejak tahun 2014, IPM dihitung setiap tahun (Badan Pusat Statistik, 2015a).

Semenjak tahun 1990, UNDP tidak pernah absen dalam mencatat perkembangan pembangunan negara di berbagai negara. Dengan mengetahui tingkat IPM suatu negara kemudian dapat dibandingkan dengan negara lain sebagai salah satu cara untuk menilai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam satu periode tertentu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Mulia & Saputra, 2020).

Tabel 1.1
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara-Negara di Asia Tenggara Tahun 2018

No.	Negara	Skor IPM	Peringkat Dunia	Perubahan Peringkat IPM 2013-2018	Rata-Rata Pertumbuhan IPM (%) 2010-2018	Kelompok
1.	Singapura	0.935	9	-1	0.35	Sangat Tinggi
2.	Brunei Darussalam	0.845	43	-6	0.19	Sangat Tinggi
3.	Malaysia	0.804	61	-1	0.49	Tinggi
4.	Thailand	0.765	77	12	0.74	Tinggi
5.	Philipina	0.712	106	3	0.73	Tinggi
6.	Indonesia	0.707	111	0	0.74	Tinggi
7.	Vietnam	0.693	118	-1	0.74	Sedang
8.	Timor Leste	0.626	131	-2	0.13	Sedang
9.	Laos	0.604	140	-2	1.28	Sedang
10.	Myanmar	0.584	145	2	1.39	Sedang
11.	Kamboja	0.581	146	-1	1.05	Sedang

Sumber: UNDP, 2020.

Pada Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa IPM Indonesia setiap tahunnya meningkat tetapi diantara negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia masih berada di urutan enam. Hal ini disebabkan oleh tidak meratanya kesejahteraan

masyarakat di 34 provinsi di Indonesia. Ketika masyarakat merasa belum sejahtera dalam artian secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan belum tercapai sepenuhnya. Sehingga diperlukan evaluasi kinerja pemerintah dan masyarakat di Indonesia dan masih diperlukan upaya keras untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia Indonesia di tengah-tengah persaingan dengan masyarakat internasional (Bhakti et al., 2017).

Sasaran pembangunan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengukuran IPM, belum menunjukkan hasil yang optimal di Indonesia. Rendahnya pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kinerja pencapaian kesejahteraan masyarakat pada skala pembangunan daerah. Hal ini karena masih belum efektif dan meratanya alokasi pembangunan pada setiap daerah (Kusreni & Suhab, 2009).

Tabel 1.2
Nilai dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatra Utara
Tahun 2014-2018

Tahun	Nilai IPM	Pertumbuhan (%)
2014	68.87	0.75
2015	69.51	0.93
2016	70	0.70
2017	70.57	0.81
2018	71.18	0.86

Sumber: BPS, 2020.

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa IPM Sumatra Utara pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatra Utara pada 2014 menempatkannya pada peringkat 10 nasional. Namun di tahun 2017-2018, peringkat IPM Sumatra Utara berada di peringkat 12 nasional. Hal ini sebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah tingkat

kemiskinan. Ada beberapa kabupaten/kota di Sumatra Utara yang persentasi penduduk miskinnya naik seperti Kabupaten Batu Bara dan Kota Tanjung Balai (Badan Pusat Statistik, 2018). Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk tetapi tidak dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan lain seperti peningkatan taraf kualitas pendidikan, sehingga tidak akan menaikkan pendapatan yang menjadi salah satu indikator meningkatnya kemiskinan (Ritonga & Wulantika, 2020).

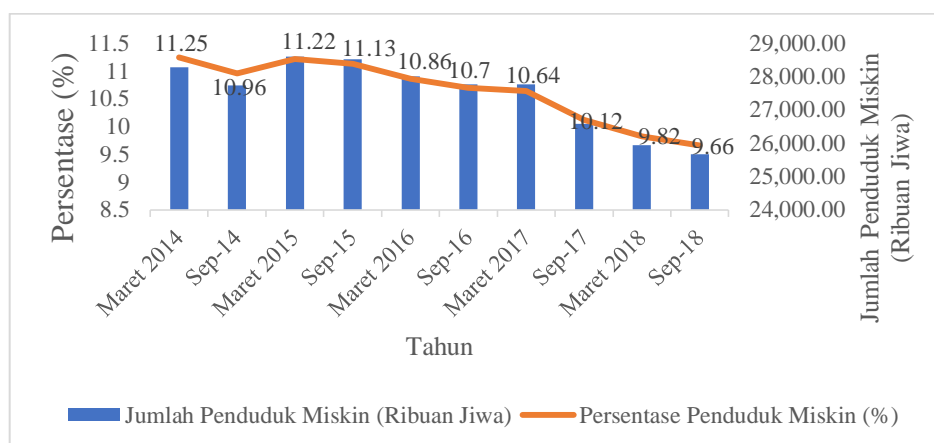
Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara (Arif et al., 2020). Pada tahun 2018, penduduk miskin Indonesia mencapai 25,67 juta jiwa. Dibandingkan tahun 2017, jumlah penduduk miskin Indonesia menurun sebanyak 908,4 ribu (Badan Pusat Statistik, 2020b). Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kepadatan penduduk, tingkat pengangguran yang tinggi, upah yang rendah dan masih dibawah standar, serta ketidakstabilan angka dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Handalani, 2019). Salah satu sebab kemiskinan karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang dapat diterima. Di samping itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran (Ferezagia, 2018).

Dewi (2016) menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti untuk penduduk miskin dibanding penduduk tidak miskin, sebab aset utama mereka adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan akan meningkatkan pendapatan mereka.

Realitanya penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan pemerintah ternyata belum mencapai hasil yang maksimal. Jumlah penduduk miskin memang sudah berkurang namun jumlahnya masih cukup besar. Secara kualitas, kehidupan rumah tangga penduduk miskin tidak pernah mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh penyeragaman kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi pada setiap wilayah. Padahal setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun budaya. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan pada tiap wilayah pasti memerlukan pendekatan yang berbeda pula (Jacobus et al., 2019).

Grafik 1.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2014-2018



Sumber: BPS, 2020.

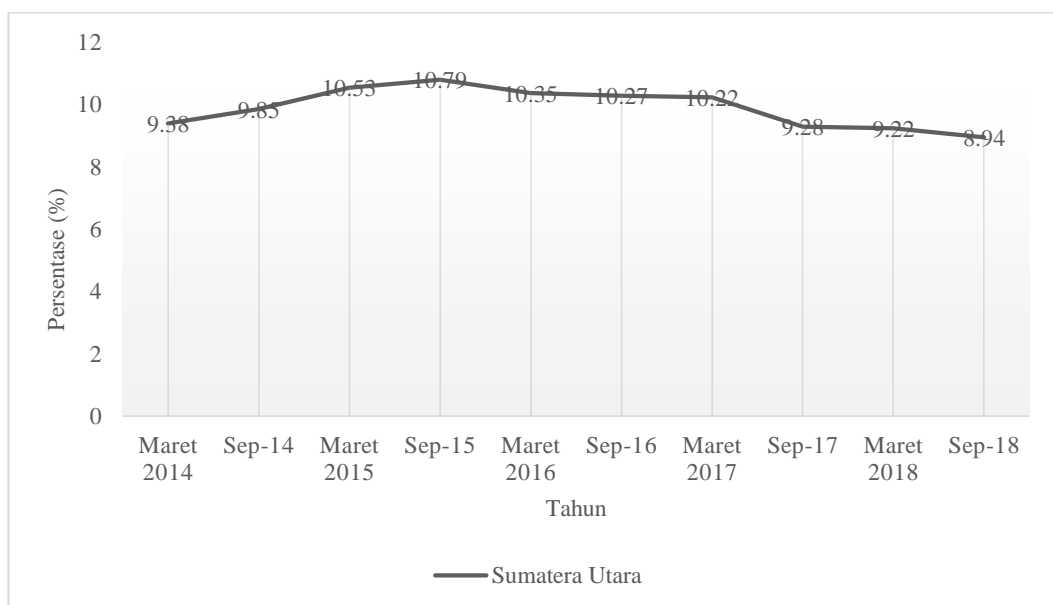
Dari grafik 1.1 dapat dilihat pada dari Maret 2014 - September 2014, jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin periode Maret 2014 – September 2014, yaitu laju inflasi umum periode Maret 2014 – September 2014 cenderung rendah, yaitu sebesar 2.26 persen, kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan kenaikan PDB atas dasar harga konstan pada triwulan III 2014 dibanding triwulan I 2014 mencapai 5,52 persen. Namun, pada Maret 2015, jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia mengalami peningkatan dikarenakan selama periode September 2014 – Maret 2015 terjadi inflasi sebesar 4.03 persen. Selain itu, secara nasional rata-rata harga beras mengalami peningkatan sebesar 14.48 persen (Badan Pusat Statistik, 2015b).

Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat di negara atau daerah tersebut. Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian (Zuhdiyati, 2017). Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus ditempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar kemampuan untuk mendirikan usaha untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru (Ferezagia, 2018).

Persentase penduduk miskin Sumatra Utara tahun Maret 2014 – September 2018 mengalami fluktuasi. Bisa dilihat dari grafik 1.2, pada Maret 2014 – September 2015 persentase penduduk miskin Sumatra Utara mengalami kenaikan.

Seperti pada periode Maret 2015 – September 2015 peningkatan persentase penduduk miskin di Sumatra Utara dipengaruhi oleh inflasi selama periode itu sebesar 3.29 persen. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yaitu dari 6.39 persen pada Februari 2015 menjadi 6.71 persen pada Agustus 2015 (BPS Sumatra Utara, 2016).

Grafik 1.2
Persentase Penduduk Miskin Sumatra Utara Tahun 2014-2018



Sumber: BPS, 2019.

Otonomi daerah telah menyebabkan pergeseran dalam paradigma pembangunan di Indonesia. Semula pembangunan didasarkan pada asas sentralisasi, kemudian berubah menjadi desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin intervensi pemerintah pusat (Putra & Ulupui, 2015). Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peran strategis pemerintah daerah

melalui APBD sebagai implementasi dari kebijaksanaan keuangan daerah diharapkan berperan efisien dan efektif dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Secara umum, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Kusreni & Suhab, 2009).

Pemerintah daerah merupakan pemegang peran penting dalam membuat kebijakan untuk menjadikan suatu daerah memiliki produktivitas yang tinggi, dimana dengan produktivitas tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat (Soebagyo et al., 2019). Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya lewat peran alokatif, dimana pemerintah harus menyusun kebijakan untuk mengalokasikan belanja daerah pada sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal berperan penting guna mencapai tujuan tersebut (Deswantoro et al., 2017).

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah ataupun untuk fasilitas publik. Dengan sarana dan prasarana yang berkualitas dapat memangkas biaya transportasi dan transaksi serta meningkatkan pergerakan barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat (Anas, 2019). Oleh sebab itu, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif. Hendaknya alokasi belanja modal dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, seperti melaksanakan kegiatan pembangunan. Namun, melihat

fenomena yang terjadi, alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat, sebab pengelolaan belanja modal masih belum berorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata (Dewi & Suyanto, 2015).

Dilihat dari tabel 1.3, persentase alokasi belanja modal Sumatra Utara tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015, persentase alokasi belanja modal mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh lambatnya persetujuan P-APBD yang baru terlaksana pada akhir tahun. Penurunan anggaran belanja modal dan realisasinya, berdampak pada melambatnya konsumsi pemerintah (Bank Indonesia, 2019). Dengan melambatnya konsumsi pemerintah, maka peningkatan fasilitas publik pun akan melambat. Pembelanjaan yang dilakukan pemerintah dapat dilihat dari sejauh mana belanja tersebut mampu memberikan pengaruh dan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan dari tahun ke tahun (Sendouw et al., 2019).

Tabel 1.3
Alokasi Belanja Modal Provinsi Sumatra Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	Realisasi Terhadap Anggaran (%)
2014	1.412.930.000.000	1.145.972.228.647	81,11 %
2015	1.394.810.000.000	932.244.349.249	66,84 %
2016	1.243.297.180.210	1.019.860.000.000	82,03 %
2017	1.790.920.557.785	1.919.452.035.914	107,18 %
2018	1.900.431.184.655	1.564.903.232.653	82,34 %

Sumber: Kemenkeu, 2016-2020.

Pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan.

Menurut Surkati (2012) menjelaskan bahwa dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah.

Tabel 1.4
Persentase Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatra Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran Pembiayaan (Rupiah)	Realisasi Pembiayaan (Rupiah)	Realisasi Terhadap Anggaran (%)
2014	37.657.125.620	51.426.062.192	136,56 %
2015	5.105.000.000	551.387.580.730	10.800,93 %
2016	-23.144.326.639	203.664.000.000	-879,97 %
2017	864.102.186.032	1.125.526.746.836	130,25 %
2018	830.000.000.000	841.496.523.210	101,39 %

Sumber: Kemenkeu, 2016-2020.

Dilihat dari tabel 1.4, pertumbuhan pembiayaan daerah Sumatra Utara tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh realisasi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya. Semakin besar SiLPA, menunjukkan kurang cermatnya penganggaran ataupun perencanaan yang baik, serta adanya kelemahan-kelemahan dalam penerapan anggaran. Sehingga rasio SiLPA terhadap belanja menampilkan jatah belanja yang tertunda ataupun anggaran yang tidak terserap (Ruhmaini et al., 2017). Dengan adanya peningkatan SiLPA, dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan semakin besar dana yang mengendap di rekening kas daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena tidak adanya pembangunan oleh pemerintah daerah (Angelina, 2017). Dengan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, maka secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat pun akan ikut terhambat juga karena tidak ada peningkatan fasilitas bagi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota, ditandai dengan adanya penyerahan beberapa kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah seperti adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri (Widani & Erawati, 2018). Kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapasitas fiskal Sumatra Utara dari tahun 2014-2016 masih dalam kategori rendah, bisa dilihat pada tabel 1.5. Kapasitas fiskal menimbulkan anggaran yang tersedia tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak menyediakan layanan publik yang berkualitas. Kapasitas fiskal yang kurang baik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Rauf, 2016). Guna mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat, pemerintah perlu meningkatkan pelayanan publik dan peran serta masyarakat agar terjadi pemerataan dan keadilan (Bawono et al., 2017).

Tabel 1.5
Perkembangan Kapasitas Fiskal Sumatra Utara 2014-2018 (Angka Indeks)

Tahun	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
2014	0.36	Rendah
2015	0.37	Rendah
2016	0.31	Rendah
2017	0.79	Sedang
2018	0.94	Tinggi

Sumber: Kemenkeu, 2014-2018.

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk mengatur dan menyusun sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi serta

tugas pembantuan yang dimaksudkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Teori kesejahteraan (*Welfare theory*) menyatakan individu memiliki hasrat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dengan kecenderungan individu untuk selalu berusaha memuaskan keinginannya, maka kesejahteraan akan dicapai pada saat kepuasan mencapai tingkat optimum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan variabel tingkat Kemiskinan yang belum dibahas dalam penelitian terdahulu. Sesuai dengan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara belum sepenuhnya merata. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kemiskinan yang menurun, tetapi masih ada beberapa daerah di Sumatra Utara yang justru meningkat kemiskinannya. Kemudian, APBD yang belum teralokasi secara optimal. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alokasi belanja modal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara?
2. Apakah pembiayaan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara?
3. Apakah kapasitas fiskal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara?
4. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengestimasi arah dan besarnya pengaruh alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara
2. Mengestimasi arah dan besarnya pengaruh pembiayaan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara
3. Mengestimasi arah dan besarnya pengaruh kapasitas fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara
4. Mengestimasi arah dan besarnya pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, referensi, dan pertimbangan bagi pemerintah Sumatra Utara dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara

2. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan, sumber acuan dan perbandingan penelitian selanjutnya untuk bidang penelitian yang sama.

E. Metode Penelitian

E.1. Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan metode ekonometrik sebagai berikut:

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log ABM_{it} + \beta_2 PD_{it} + \beta_3 KF_{it} + \beta_4 \log KMS_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1.1)$$

Dimana:

KM	: Kesejahteraan Masyarakat/IPM (Angka Indeks)
ABM	: Alokasi Belanja Modal (Miliar Rupiah)
PD	: Pembiayaan Daerah (Miliar Rupiah)
KF	: Kapasitas Fiskal (Angka Indeks)
KMS	: Tingkat Kemiskinan (Ribu jiwa)
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi variabel independen
ε_t	: Komponen <i>error</i>
<i>log</i>	: Operator logaritma berbasis <i>e</i>
<i>i</i>	: Data <i>time series</i>
<i>t</i>	: Data <i>cross section</i>

Dimodifikasi dari penelitian Kusreni & Suhab (2009)

E.2. Data dan Sumber Data

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data dengan rentang waktu dari tahun 2014 sampai tahun 2018, yang meliputi data Indeks Pembangunan Manusia, alokasi belanja modal, pembiayaan daerah, kapasitas fiskal, dan kemiskinan di Sumatra Utara. Data akan diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

F. Sistematika Pembahasan

Berikut merupakan sistematika penyusunan penulis:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data. Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang berhubungan dengan variabel yang dibahas pada penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif variabel, analisis data, dan interpretasi hasil serta interpretasi ekonomi.

BAB V PENUTUP

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan saran kebijakan, baik bagi otoritas pembuat kebijakan ekonomi dan *stakeholder*, serta penelitian selanjutnya.